

**ANALISIS STRATEGI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)  
DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Ismanto Ali Mustofa

NPP. 30.0683

*Asdaf Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [ismantoali170700@gmail.com](mailto:ismantoali170700@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** The level of public participation has not reached the Key Performance Indicator (IKU) target yet, even though political education activities have been implemented. **Purpose:** The aim of this research is to identify and analyze the strategies for improving political education carried out by the Kebumen Regency Kesbangpol. **Method:** This study uses descriptive qualitative method with an inductive approach to Peter Schroder's Theory of Political Strategy. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The results of the study show that political education has been going well, this is supported by the existence of laws and regulations, human factors, budgets and external coordination. However, the level of political education is still relatively low, which built an impact on the public participation that is not maximally reached. **Conclusion:** The political education strategy carried out by Kesbangpol has been thoroughly implemented, but has not been able to reach all the people of Kebumen Regency. Due to limited budget allocations and the used methods, this has affected the level of public participation in elections and post-conflict local elections which has not been maximized and some have not reached the target. In the future, it is recommended to utilize social media, bring political education closer to village communities and bring political education closer to novice voters at high schools and universities in Kebumen Regency.

**Keywords:** Strategy Analysis, Political Education, Elections, General Elections

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara keseluruhan, padahal kegiatan pendidikan politik sudah dilaksanakan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Kebumen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif terhadap Teori Strategi Politik Peter Schroder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan pendidikan politik sudah berjalan dengan baik, hal ini

didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan, faktor manusia, anggaran dan koordinasi eksternal. Namun cakupan pendidikan politik masih tergolong rendah yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal. **Kesimpulan:** Strategi pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol sudah terlaksana secara keseluruhan, namun belum bisa mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Karena keterbatasan alokasi anggaran dan metode yang digunakan, hal ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada yang belum maksimal dan ada yang belum mencapai target. Kedepannya disarankan memanfaatkan media sosial, mendekatkan pendidikan politik kepada masyarakat desa/kelurahan dan mendekatkan pendidikan politik kepada pemilih pemula di SLTA dan Universitas di Kabupaten Kebumen.

**Kata Kunci:** Analisis Strategi, Pendidikan Politik, Pemilu, Pilkada

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang demokratis dimulai dengan kehidupan partai politik, kemudian dilanjutkan dengan adanya ketentuan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Thoha 2014). Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesbangpol target partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada sebesar 70%. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Kebumen pada pemilihan gubernur tahun 2018 sebesar 64,84% belum mencapai target 70%. Partisipasi pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 sebesar 70% dan 71,2% mencapai target 70%. Kemudian partisipasi pada pemilihan bupati tahun 2020 sebesar 64% belum mencapai target 70%. Pemilihan gubernur dan pemilihan bupati belum mencapai target partisipasi 70% sesuai IKU Kesbangpol.

Pendidikan politik dilakukan untuk menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Melalui pendidikan politik, masyarakat memperoleh informasi, wawasan dan keterampilan politik yang memadai, sehingga memiliki kesanggupan untuk berpikir kritis agar berani melawan situasi yang tidak sehat dan tidak wajar, mampu mengadakan orientasi terhadap diri dan lingkungannya, sehingga mendorong terciptanya iklim kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sehat dan demokratis (Puji Lestari 2016). Kegiatan pendidikan politik yang sudah dilaksanakan oleh Kesbangpol Kabupaten Kebumen diantaranya penyuluhan kepada masyarakat, forum diskusi politik dan bantuan keuangan partai politik. Pendidikan politik dilakukan setiap tahunnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Kebumen.

Strategi peningkatan pendidikan politik sudah dilakukan oleh Kesbangpol untuk menghadapi pemilu dan pilkada belum bisa mendorong tingkat partisipasi masyarakat sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati belum mencapai target partisipasi sebesar 70%. Sehubungan dengan sudah terlaksananya kegiatan pendidikan politik namun tingkat partisipasi belum tercapai secara maksimal dan ada yang tidak mencapai target, hal ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan politik mengalami hambatan dan tantangan di tengah masyarakat. Perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi agar bisa menjadi evaluasi untuk strategi peningkatan pendidikan politik dalam menghadapi tahun pemilu dan pilkada 2024.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan belum tercapainya secara penuh target partisipasi masyarakat pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesbangpol Kabupaten Kebumen. Padahal kegiatan pendidikan politik sudah dilakukan setiap tahunnya menjelang pemilu dan pilkada untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Adanya pandemi *covid-19* berdampak pada pelaksanaan pendidikan politik menjelang pemilihan bupati tahun 2020.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu metode pendidikan politik dengan sosialisasi secara langsung yang berakibat cakupan pendidikan politik sangat terbatas. Kemudian ditengah perkembangan teknologi dan informasi, kelompok pemuda lebih tertarik dengan media sosial dan media masa. Kekuatan daerah dalam alokasi anggaran pendidikan politik juga sangat terbatas, sehingga perlunya inovasi pendidikan politik agar cakupan pendidikan politik lebih luas, efektif dan efisien.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat” yang bertujuan untuk mengetahui apakah pera Kesbangpol sudah berjalan dengan baik atau belum berdasarkan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan Kesbangpol. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Ilham Agung Ashariadi menunjukkan Kesbangpol Kabupaten Cirebon memiliki kendala dalam penyusunan renstra yang membelenggu, anggaran yang terbatas, belum memiliki silabus serta kualitas SDM yang rendah. Upaya yang dilakukan dengan emingkatkan SDM dan meningkatkan bantuan keuangan partai politik (Ashariadi 2020).

Penelitian yang dilakukan Nandy Tri Ariesta dengan judul “Implementasi Program Sosialisasi Politik dalam Meningkatkan Budaya Partisipatif Siswa-Siswi SLTA di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat” bertujuan untuk mengetahui program sosialisasi politik yang dilaksanakan Kesbangpol dalam meningkatkan budaya partisipatif siswa-siswi SLTA di Kota Bekasi. Adapun Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sosialisasi politik di masa *covid-19* menggunakan zoom dan google meet, agar sosialisasi politik tetap terlaksana. Namun berdampak pada kegiatan sosialisasi politik tidak menarik, perlu adanya strategi melalui inovasi pelaksanaan sosialisasi politik dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat (Ariesta 2022).

Penelitian dilakukan Afryan Wahyu P. Parazi dengan judul “Strategi DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung dalam Pendidikan Politik pada Kaum Milenial di Provinsi Lampung” bertujuan mengetahui strategi dan implementasi pendidikan politik kepada kaum milenial di Provinsi Lampung. Adapun hasil penelitian meliputi konsep dan rancangan dengan cara kekinian, strategi, dan implmentasi dengan menggunakan aplikasi yang mudah diakses, relevansi dengan tetap dalam ajaran islam agar menjadi masyarakat yang madani. Pendidikan politik dinilai masih belum maksimal pada kaum milenial disebabkan kurangnya anggota dan keterwakilan di parlemen (Arzi 2022).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai analisis strategi kantor kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kebumen sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang peran, implementasi, dan strategi pada pendidikan politik. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Strategi Politik Peter Schroder yang memperkenalkan 10 langkah strategis. Teori ini dugunakan untuk menganalisis strategi yang sudah dilaksanakan, sehingga analisis yang kita dapat berupa startegi pendidikan politik yang sudah dilaksanakan.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan strategi Keksangpol dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat pada pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Kebumen serta

menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan kesbangpol dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat dalam menghadapi pemilu dan pilukada di Kabupaten Kebumen.

## **II. METODE**

Adapun jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yakni penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk melakukan teknis analisis triangulasi (Sugiyono 2017). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan politik, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dan fakta berupa arsip dan dokumen laporan kegiatan, serta observasi dilakukan untuk mengetahui sebab akibat dalam pelaksanaan pendidikan politik. Adapun analisis permasalahan menggunakan Teori Strategi Politik Peter Schroder yang menjelaskan bahwa pelaksanaan 10 langkah strategis dalam pendidikan politik bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu strategi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis strategi Kesbangpol dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat pada pemilu dan pilukada di Kabupaten Kebumen menggunakan teori strategi politik Peter Schroder yang menyatakan 10 langkah-langkah strategi politik yaitu merumuskan misi, penilaian situasional dan evaluasi, perumusan sub-strategi, perumusan sasaran, target image, kelompok-kelompok target, pesan kelompok target, instrumen-instrumen kunci, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

### **3.1 Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pilukada di Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis dapatkan di lapangan tentang Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat pada pemilihan umum dan pilukada di Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan menggunakan teori Strategi Politik Peter Schroder sesuai dengan unsur yang mempengaruhi implementasi program tersebut sebagai berikut:

#### **A. Merumuskan Misi**

Perumusan misi kesbangpol salah satunya yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan melalui peningkatan pengetahuan generasi muda, pelajar dan masyarakat dalam demokrasi, untuk mencapai visi “Kebumen yang Demokratis dan Kondusif”. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesbangpol pada capaian partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, namun belum sepenuhnya IKU tercapai padahal kegiatan pendidikan politik sudah dilaksanakan. Berdasarkan data dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 Capaian kinerja Kesbangpol dalam pendidikan politik tercapai 100%. Sehingga misi yang sudah dirumuskan Kesbangpol salah satunya melalui pendidikan politik sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum bisa mencapai tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilukada sebesar 70% secara keseluruhan.

#### **B. Penilaian Situasional dan Evaluasi**

Penilaian situasional menunjukkan keadaan saat itu, didasarkan atas fakta internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap rencana strategis. Hasil analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan fakta

internal berupa dasar hukum perda dan perbup menjadi dasar utama pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari penyediaan anggaran, sarana dan prasarana. Sehingga kelemahan bisa diminimalisir sedangkan kegiatan bisa tetap berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memberikan pertimbangan terhadap kegiatan pendidikan politik. Hal ini bisa dilihat dengan adanya refokusing anggaran sehingga pada tahun 2020 kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terjadi perubahan target kegiatan.

### **C. Perumusan sub-strategi**

Perumusan strategi dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan yaitu untuk membuat rakyat:

1. Mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik
2. Berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap
3. Aktivasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati
4. Dan sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

Tujuan ini sudah terlaksana dengan capaian target pemilihan umum presiden dan legislative tercapai 70%. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya penunjang bantuan keuangan partai politik, penyuluhan kepada masyarakat dan koordinasi forum-forum diskusi politik. Sehingga pelaksanaan pemilihan umum terlaksana dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat dan mencapai target sesuai IKU Kesbangpol.

### **D. Perumusan Sasaran**

Sasaran harus menggambarkan keadaan akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Keadaan akhir yang ingin dicapai yaitu tercapainya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum dan pemilukada sebesar 70%. Dalam mencapai tujuan akhir harus memperhatikan antara lain:

1. Peran insani dari setiap individu sebagai warga negara.
2. Mengembangkan semua bakat dan kemampuan (pengetahuan, wawasan, sikap, keterampilan, dan lain-lain).
3. Agar ia bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pengembangan negara dan bangsa. Keadaan akhir yang menjadi tujuan dilakukan dicapai dengan perumusan sasaran pendidikan politik yaitu:

1. Kegiatan penyuluhan masyarakat : ketua tim penggerak PKK kecamatan dan ketua tim penggerak PKK desa/kelurahan, pengurus ormas perempuan, pengurus parpol perempuan dan guru perempuan SMK/SMK.
2. Koordinasi forum-forum diskusi politik : ASN, pengurus ormas, anggota DPRD, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan, dan pemilih pemula.
3. Bantuan keuangan partai politik : Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kebumen.

Sasaran pendidikan politik sudah terlaksana, tetapi tujuan akhir pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum belum tercapai secara keseluruhan.

### **E. Target Image (citra yang diinginkan)**

*Target image* ditentukan oleh keputusan strategis dan kebijakan yang ditentukan oleh bidang politik dalam negeri diterjemahkan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Partai Politik dalam rangka kemandirian partai politik dengan memberikan bantuan keuangan partia politik;

2. Meningkatkan keharmonisan antara partai politik dan penambahan berpolitik dengan memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi forum-forum diskusi politik, dan bantuan keuangan partai politik penting dilakukan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi masyarakat melalui suksesnya pemilihan umum. Hal ini dilakukan melalui kegiatan ceramah, dialog/ tanya jawab. Pelaksanaan pendidikan politik melalui pemberian pemahaman dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun terkait dengan penggunaan media sosial televisi dan radio penulis tidak menemukan data kegiatan tersebut.

#### **F. Kelompok-Kelompok Target**

Kelompok target yang menjadi narasumber pendidikan politik yaitu Dosen Universitas, pembicara tingkat provinsi, pembicara tingkat kabupaten, dan pihak yang mendukung kegiatan pendidikan politik. Kelompok target yang menjadi peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat antara lain:

1. Kelompok perempuan: Anggota DPRD dari unsur perempuan, GOW, KNIP, Ketua tim penggerak PKK Kecamatan dan Ketua tim penggerak PKK Desa, Pengurus Ormasperempuan, pengurus partai politik perempuan dan pemilih pemula perempuan (SMK/SMA).
2. Kelompok Masyarakat: ASN, pengurus parpol, anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas kepemudaan, dan pemilih pemula.
3. Partai politik: Ketua parpol, sekretaris parpol, anggota parpol.

Kelompok-kelompok target dalam pendidikan politik, melakukan kerjasama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Sehingga kegiatan pendidikan politik bisa dilaksanakan untuk mencapai misi yang sudah ditentukan sebelumnya.

#### **G. Pesan Kelompok Target**

Pesan kelompok target berupa informasi-informasi yang yang dibutuhkan berdasarkan keputusan strategis. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing-masing kelompok target harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Pesan yang disampaikan berupa materi seputar pendidikan politik, demokrasi, partisipasi, dan perkembangan politik. Materi yang disampaikan ditentukan oleh Kesbangpol yang akan dipaparkan narasumber kepada peserta pendidikan politik. Materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan kepada perempuan dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan baik untuk berpartisipasi secara langsung di dunia politik maupun untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu. Sedangkan kegiatan forum-forum diskusi politik lebih ditunjukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan mendorong partisipasi dalam pemilu. Materi yang diberikan setiap tahunnya sama hanya saja informasi perkembangan politik yang berubah. Selain materi yaitu memberikan motivasi dan diskusi tanya jawab dilakukan agar masyarakat termotivasi dan lebih paham akan materi yang diberikan.

#### **H. Instrumen-Instrumen Kunci**

Instrumen kunci berupa aksi-aksi dan alat komunikasi yaitu melalui penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi forum-forum diskusi politik, dan hibah bantuan keuangan partai politik dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol untuk mendorong pendidikan politik dalam lingkungan partai politik. Alat komunikasi yang digunakan yaitu ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan tujuan secara umum menghadapi pemilihan umum. Selain itu pendidikan politik dengan alat komunikasi media sosial tidak ditemukan data pendukung.

Kegiatan pendidikan politik melalui aksi sosialisasi secara langsung belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditunjukkan bahwa pendidikan politik yang terlaksana

antara tahun 2016-2021 hanya dapat diikuti 4.600 orang, sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 962.794 orang. Hal ini menunjukkan kegiatan pendidikan politik hanya mencakup 0,47 persen dari penduduk usia produktif. Sehingga bisa dikatakan instrument-instrumen yang digunakan menghasilkan cakupan pendidikan politik masyarakat masih cukup rendah.

#### **I. Implementasi Strategi**

Implementasi strategi ditentukan oleh faktor manusia dan faktor operasional. Sumber daya manusia yang dimiliki Kesbangpol berjumlah 19 orang. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik seluruh pegawai dilibatkan dalam panitia kegiatan yang termuat dalam Surat Keterangan (SK Tim) panitia kegiatan pendidikan politik.

Terkait dengan operasional menjadi pendukung strategi pendidikan politik yang sangat menentukan kelancaran kegiatan. Anggaran pendidikan politik di Kabupaten Kebumen cukup besar setiap tahunnya, meskipun realisasi anggaran tidak tercapai 100% tetapi target kegiatan sudah tercapai 100%. Kemudian terkait bantuan keuangan partai politik merupakan hibah dari pemerintah daerah yang diberikan kepada partai politik melalui Kesbangpol.

Sehingga implementasi strategi pendidikan politik sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlaksana dengan dukungan SDM Kesbangpol dan anggaran operasional kegiatan pendidikan politik.

#### **J. Pengendalian Strategi**

Pengendalian strategi ditentukan oleh proses pengumpulan data dan perolehan informasi serta prinsip keamanan dan perlindungan terhadap pihak sendiri. Pengumpulan data dan informasi kegiatan pendidikan politik dilakukan melalui pembuatan dan penyusunan laporan yang berisi laporan kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Kemudian terkait dokumen pelaksanaan anggaran dibuat dalam laporan Ganti Uang (GU) yang berisikan data penggunaan anggaran dalam 1 (satu) kegiatan. Karena pembiayaan kegiatan akan diberikan setelah seluruh kegiatan selesai.

Penyusunan laporan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran sangat penting sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan apabila suatu waktu ada audit dari Inspektorat Kabupaten atau Badan Pengawas Keuangan (BPK) semua laporan kegiatan ada dan tidak ada temuan penyalahgunaan anggaran.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Strategi Pendidikan Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilukada**

Faktor pendukung dalam penerapan strategi pendidikan politik masyarakat pada pemilihan umum dan pemilukada oleh Kesbangpol yakni adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Kesbangpol dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 tentang tupoksi Kesbangpol sehingga kegiatan pendidikan politik sudah terlaksana dengan baik. Kemudian, faktor manusia dari internal maupun eksternal Kesbangpol yang sudah melaksanakan rangkaian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dengan baik. Kemudian, adanya kerjasama antar instansi dan organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik baik ditingkat provinsi, kabupaten, dan desa/kelurahan sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, anggaran untuk menunjang kegiatan pendidikan politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen untuk membiayai operasional kegiatan pendidikan politik.

Selanjutnya, faktor penghambat dalam penerapan strategi pendidikan politik masyarakat pada pemilu dan pilukada oleh Kesbangpol yakni adanya pandemic *covid-19* yang berakibat kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ditiadakan pada tahun 2020 padahal ditahun itu ada pemilihan bupati Kabupaten Kebumen. Kemudian, metode pendidikan politik masih berupa sosialisasi berbentuk ceramah, dialog/ tanya jawab yang berdampak pada rendahnya cakupan pendidikan politik. Selain itu, adanya perspektif masyarakat yang kurang tertarik dengan pendidikan politik terutama kelompok pemuda yang masih banyak golput dalam pemilu dan pilukada.

### **3.3 Upaya Kesbangpol Mengatasi Hambatan Strategi Pendidikan Politik**

Upaya yang dilakukan Kesbangpol untuk mengatasi hambatan pelaksanaan strategi pendidikan politik yaitu dengan keterbatasan jumlah pegawai Kesbangpol maka setiap kegiatan pendidikan politik seluruh pegawai Kesbangpol dilibatkan dalam panitia yang temuat dalam SK Tim. Kemudian, dengan meningkatkan jumlah peserta pendidikan politik pada pemilu tahun 2019 sejumlah 1200, dikarenakan hasil pemilihan gubernur tahun 2018 di Kabupaten Kebumen tidak mencapai target partisipasi 70%. Selain itu, keterbatasan kekuatan daerah dalam pengalokasian dana membuat pendidikan politik tidak bisa dilakukan kepada seluruh masyarakat, sehingga peserta pendidikan politik terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kader partai politik dan pemilih pemula yang diharapkan akan menyampaikan kembali kepada anggotanya, temannya, dan pengikutnya.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Strategi pendidikan politik sudah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik, hal ini memberikan dampak partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilukada. Namun, hasil yang diperoleh belum maksimal dengan target partisipasi 70% secara keseluruhan. Penulis menemukan temuan penting yakni pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol masih dilakukan menggunakan metode sosialisasi secara langsung. Sama halnya dengan temuan Ashariadi bawa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Cirebon masih berbentuk sosialisasi yang menjadi rutinitas Kesbangpol (Ashariadi 2020).

Layaknya program lainnya, strategi pendidikan politik juga masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu pelaksanaan pendidikan politik dilakukan dengan metode sosialisasi yang berakibat pendidikan politik belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Berbeda dengan temuan penelitian Ariesta, dimana pendidikan politik dilakukan di masa *Covid-19* menggunakan media zoom dan google meet, namun mengakibatkan sosialisasi tidak menarik bagi generasi muda (Ariesta 2022).

Pelaksanaan pendidikan politik diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilukada. Peneliti menemukan bahwa Kesbangpol memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendukung proses demokrasi dan pemahaman politik masyarakat yang lebih dewasa. Temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena berbeda objek penelitian yang dilakukan Afryan menemukan bahwa pendidikan politik juga dilaksanakan oleh DPW Partai Gelora Indonesia Lampung kepada generasi milenial (Arzi 2022).

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan pelaksanaan pendidikan politik masih dilakukan menggunakan metode sosialisasi secara langsung. Hal ini berakibat pendidikan politik belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada belum maksimal dan belum mencapai target IKU Kesbangpol 70% secara keseluruhan



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi pendidikan politik masyarakat yang dilakukan kesbangpol sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Pelaksanaan strategi pendidikan politik sudah terlaksana secara keseluruhan, namun strategi yang diterapkan belum bisa mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Sehingga partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilukada belum maksimal dan ada yang belum mencapai target. Guna meningkatkan cakupan pendidikan politik, penulis menyarankan untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam pelaksanaan pendidikan politik. Kemudian mendekatkan pendidikan politik kepada kelompok masyarakat paling kecil yaitu desa atau kelurahan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan SLTA dan Universitas untuk melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga dilakukan hanya berfokus pada strategi Kesbangpol dalam peningkatan pendidikan politik pada masyarakat di Kabupaten Kebumen.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Kebumen untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kebumen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan
- Ariesta, Nadya Tri Syah. 2022. "Implementasi Program Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Budaya Politik Partisipatif Siswa-Siswi Slta Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat."
- Arzi, Afryan Wahyu P. P. 2022. "Strategi DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pendidikan Politik Pada Kaum Milenial Di Provinsi Lampung."
- Ashariadi, Ilham Agung. 2020. "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12–26. <http://eprints.ipdn.ac.id/6207/>.
- Puji Lestari, Eko Handoko. 2016. *Pendidikan Politik*. Edisi Pert. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R@D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indoensia*. Edisi Pert. Jakarta: Prenadamedia Group.